

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah terjadi demonstrasi pada Agustus 2025, banyak kerusuhan dan kerugian yang dialami beberapa pihak, salah satunya adalah citra buruk terhadap polisi RI di mata masyarakat. Banyak berita dari media massa dan pendapat publik yang menyoroti tindakan penanganan aksi demonstrasi dinilai kurang profesional sehingga polisi RI mendapatkan banyak kritikan, terutama saat menggunakan kekuatan yang berlebihan, penangkapan masyarakat yang semena-mena, dan membatasi kebebasan pendapat. Data Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian sejak tahun 2021 sampai 2024 mengalami lonjakan sekitar 75%. Dari data tersebut, semakin memperkuat persepsi publik terhadap sistem dan aturan yang bermasalah dalam pengamanan aksi massa oleh kepolisian. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal polisi RI yaitu melindungi masyarakat dengan realitas yang dialami masyarakat contoh kasusnya adalah meninggalnya Affan Kurniawan (ojek online) yang terlindas brimob polisi pada 28 Agustus 2025.

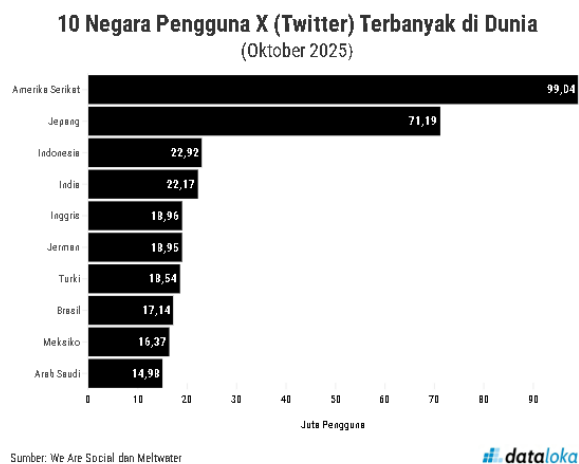
Tujuan awal mula Kepolisian RI dibentuk adalah untuk mengayomi, melayani masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menegakkan hukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat menilai kepolisian mengalami malfungsi melihat dari tindakan semena-mena oleh polisi sehingga menimbulkan rasa ragu dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap integritas dan profesional kepolisian (Daeng et al., 2024). Polisi menjadi sorotan publik karena masyarakat merasa polisi tidak transparan dan semena-mena saat menjalankan tugasnya sebagaimana baiknya (Kurniawan et al., 2025). Kepercayaan masyarakat yang semakin menurun mencerminkan penurunan dukungan masyarakat kepada polisi RI (Handaningtias et al., 2022). Masyarakat menganggap bahwa polisi telah bersikap bias dan lebih mendukung kelompok-kelompok kaya (oknum) dengan bertindak buruk kepada masyarakat (Daeng et al., 2024). Tindakan penanganan yang dilakukan kepolisian saat demonstrasi kemarin menjadi boomerang bagi pihak kepolisian karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan masyarakat yaitu mendapat pelayanan dan respon yang baik dari polisi RI sehingga menimbulkan kemarahan publik (Amelia, 2025).

Setelah kejadian tindakan polisi yang mengecewakan masyarakat, perkembangan media sosial memiliki peran penting untuk masyarakat menyampaikan kritik dan opini mereka. Siska dalam (Rahman & Claretta, 2025) berpendapat bahwa perkembangan media sosial didukung dengan adanya internet yang tidak terbatas dalam ruang maupun waktu sehingga dapat menjadi sarana menyebarkan informasi maupun pendapat secara efektif dan cepat. Didukung dengan pendapat McCombs dan Shaw dalam (Kurniawan et al., 2025), menyatakan bahwa media sosial sekarang memiliki kekuatan dalam mengangkat isu-isu menjadi viral di kalangan publik dari algoritma. Perkembangan media sosial saat ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra sebuah institusi melalui narasi dan informasi yang disebar (Syafuddin, 2022). (Juniarti et al., 2022) berpendapat bahwa citra suatu organisasi atau instansi dapat dipengaruhi oleh publik yang bebas menyampaikan kritikan di internet, publik cenderung menyebarkan informasi yang sebelumnya dia dapatkan dari suatu platform ke platform lain untuk mencari kebenaran informasi yang diterima dan menyebabkan publik menjadi pengguna aktif di dunia maya.

Media sosial memiliki peran dalam membentuk opini terkait polisi karena lebih cepat terhubung langsung dengan masyarakat

(Kurniawan et al., 2025). Setelah terjadi tindakan kekerasan polisi yang berlebihan menjadikan sorotan bagi publik, banyak publik menjadi komunikator untuk membahas dan menyampaikan pendapatnya terkait isu-isu krisis politik dan tindakan polisi sehingga mempengaruhi citra polisi RI. Kejadian-kejadian tersebut yang disebarkan melalui media sosial menjadi pemicu amarah publik dan menimbulkan ketegangan sosial antara kepolisian dan masyarakat (Kurniawan et al., 2025). Ditambah berbagai narasi dari berita media massa berupa sindiran terhadap tindakan polisi menjadi salah satu faktor penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan secara drastis dan meningkatkan kritikan terhadap kepolisian (Handaningtias et al., 2022; Kurniawan et al., 2025). Masyarakat secara aktif menilai kinerja polisi dari apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan dipersepsikan dari informasi yang didapatkan untuk menjadi dasar penilaian (Handaningtias et al., 2022). Menurut Wahid dalam (Syafuddin, 2022), sikap netizen yang semakin aktif membicarakan suatu isu di media sosial akan menjadi viral dan menyebabkan adanya opini publik sebagai bentuk respon terhadap suatu isu. Terlebih lagi masyarakat saat ini dapat melakukan kegiatan praktik politik seperti aksi kampanye melalui media sosial karena masyarakat membutuhkan perubahan layanan polisi menjadi lebih baik (Syafuddin, 2022; Pung permadi et al., 2023). Salah satu

media sosial yang digunakan masyarakat menyebarkan informasi pasca demonstrasi kemarin, yaitu X (Twitter). Platform tersebut berfungsi sebagai penghubung antar pengguna untuk diskusi dan membangun narasi bersama dalam menanggapi isu-isu seperti kritik terhadap polisi agar viral. Yaqub dalam (Efendi et al., 2023) berpendapat bahwa saat ini media sosial X menjadi platform penyebaran informasi dan diskusi politik yang efektif bagi pengguna karena memiliki jaringan komunikasi terbuka sehingga tercatat data statistik jumlah pengguna X sampai Oktober 2025 dengan Indonesia berada di posisi ketiga sejumlah 22,92 juta pengguna.



Gambar 1.1 Data Statistik Pengguna X (Twitter) Di Dunia Bulan Oktober 2025

Sumber: dataloka.com, 2025

Masyarakat melakukan kampanye untuk mendesak adanya Reformasi Polri dengan membuat hashtag #ReformasiPolri viral di

media sosial X. Banyak postingan yang membahas isu malfungsi etika polisi. Salah satu postingan yang mendapatkan banyak perhatian dari publik yaitu akun @Project Multatuli memposting tentang kejadian demo pada Agustus 2025 sama seperti demo di tahun 1998. Postingan tersebut memiliki 2.2M viewers, 129 quotes, 8.163 like, dan 4.494 repost. Dari temuan ini menunjukkan bahwa fungsi dari media sosial tidak hanya sebagai sarana informasi melainkan juga sebagai wadah komunikasi politik dan sosial. Hashtag #ReformasiPolri sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat dan representasi dari jaringan komunikasi yang partisipatif yang mana setiap pengguna memiliki peran memproduksi dan menyebarkan sebuah informasi untuk membentuk arah perubahan institusional kepolisian di Indonesia. Dengan adanya pola interaksi yang saling terhubung, masyarakat dapat membangun narasi kolektif terkait Reformasi polisi RI.



Gambar 1.2 Tweet @Project Multatuli Membahas Kaitan Demo Agustus 2025 dengan Demo Tahun 1998

Sumber: akun @Project Multatuli di X (Twitter), 2025

Setelah kampanye Reformasi Polri viral di media sosial, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengadakan rapat dengan Presiden RI, yaitu Prabowo Subianto Djojohadikusumo pada 12 September 2025. Hasil dari rapat tersebut adalah pernyataan bahwa Presiden setuju dengan adanya pembentukan tim Reformasi polisi RI. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan Presiden dengan GNB seperti gayung bersambut karena bersamaan tuntutan perlunya evaluasi dan Reformasi kepolisian dengan konsep yang sedang diusung oleh Presiden. Amir Hamzah selaku Pengamat Intelijen dan Geopolitik juga menegaskan pembentukan tim Reformasi

polisi RI merupakan instruksi langsung dari Presiden dan hasil kerja yang telah dilakukan akan langsung disampaikan kepada Presiden.

Namun disisi lain, kepolisian bergerak melakukan sebuah perubahan yaitu Transformasi Polri sebagai upaya perubahan dan perbaikan institusi kepolisian secara menyeluruh agar lebih responsif, profesional, dan dipercaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Program utama yang dicetuskan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, sebagai KaPolri dalam Transformasi Polri adalah “Polisi RI Presisi” yang berarti prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan dengan tujuan membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat (Riadi & Kurniawati, 2022). Pada tanggal 17 September 2025, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si membuat tim Transformasi polisi RI beranggotakan 52 perwira. Dirangkum dari GoodStats, tugas dari tim Transformasi polisi RI memiliki fokus di empat bidang, yaitu:

- a. Transformasi pengawasan, yaitu menerima pengawasan untuk transparansi dan mencegah tindakan Polri sewenang-wenang sehingga masyarakat dapat turut andil mengawasi kinerja kepolisian (Riadi & Kurniawati, 2022).

- b. Transformasi operasional, dengan meningkatkan efektivitas kinerja polisi saat menangani berbagai kasus dan menjaga keamanan masyarakat.
- c. Transformasi organisasi, yaitu memperbaiki struktur instansi internal untuk adaptif dan efisien dalam menjalankan tugas.
- d. Transformasi pelayanan publik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih humanis, berbasis teknologi digital dan mudah diakses. Harapannya polisi dapat berperan menjadi institusi yang berorientasi di pelayanan masyarakat secara holistik (Khairunnisa et al., 2025).

Dalam perencanaan Transformasi ini, kepolisian lebih menekankan pada perubahan nilai dan budaya organisasi yang berfokus pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keterbukaan, dan peningkatan layanan masyarakat. Pihak kepolisian juga berencana mengajak akademisi, praktis hukum, tokoh masyarakat bahkan lembaga independen untuk menerima aspirasi-aspirasi masyarakat agar proses Transformasi berjalan dengan partisipatif dan akuntabel. Dengan adanya Transformasi polisi RI, publik berharap kepolisian menjadi institusi yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat

Melihat sudut pandang ilmu komunikasi, isu ini berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi sehingga menciptakan opini publik di dunia digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis jaringan komunikasi berbasis *big data* terhadap Reformasi dan Transformasi polisi RI sehingga dapat melihat perbedaan dari dua isu tersebut. Jaringan komunikasi memiliki peran yang penting dalam melihat atau menganalisis komunikasi yang terjalin terhadap suatu isu di media sosial terutama di platform X (Twitter). Terdapat penelitian-penelitian terdahulu menganalisis peran aktor (pengguna) dalam mempengaruhi pandangan publik di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda terhadap satu isu politik (Bakry, 2020; Khairiza & Kusumasari, 2020). Walaupun banyak pembahasan isu tentang Reformasi dan Transformasi polisi RI di media sosial dan media massa, kajian ilmiah masih terbatas dalam memetakan jaringan komunikasi terkait dua istilah tersebut. Maka dari itu, analisis jaringan komunikasi diperlukan dalam penelitian untuk menunjukkan data visual gambar dari hubungan jaringan komunikasi antar aktor untuk dideskripsikan dan dianalisis perbedaannya (Soenar & Nurrahmawati, 2021). Melalui analisis jaringan komunikasi dengan *big data*, hasil data terkait isu Reformasi dan Transformasi polisi RI dapat diolah untuk menggambarkan jaringan komunikasi melalui setiap interaksi aktor

(*tweet, mention, retweet, like*, dan penggunaan hashtag). Dalam penelitian ini menggunakan data percakapan publik di X selama rentang waktu Agustus sampai Oktober 2025. Data akan diolah dengan pendekatan analisis big data dan *Social Network Analysis* (SNA) untuk memetakan struktur jaringan komunikasi yang terbentuk di dunia digital. Hasil data dari metode kuantitatif akan dianalisis secara mendalam menggunakan *Foucauldian Discourse Analysis* (FDA) untuk mengidentifikasi kontestasi kedua narasi isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan sudut pandang tentang Reformasi dan Transformasi Polri melalui jaringan komunikasi berbasis big data yang terbentuk. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara jaringan komunikasi dan pandangan publik terhadap kebenaran terkait perubahan suatu institusi Polri RI.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontestasi narasi dari jaringan komunikasi terhadap isu Reformasi dan Transformasi Polri di media sosial X dengan *Social Network Analysis* (SNA) dan *Foucauldian Discourse Analysis* (FDA).

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontestasi narasi dari jaringan komunikasi terhadap isu Reformasi dan Transformasi Polri di media sosial X dengan *Social Network Analysis* (SNA) dengan memetakan level aktor, level kelompok, dan level struktur jaringan dan *Foucauldian Discourse Analysis* (FDA).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu komunikasi pada ranah komunikasi digital dengan pendekatan *big data* dan analisis jaringan komunikasi sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami pola komunikasi di media sosial yang memiliki pengaruh membentuk opini publik.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepolisian, lembaga pemerintah, dan pihak yang terlibat

dalam memilih strategi komunikasi publik secara tepat, efektif, transparan, dan partisipatif dengan memahami dinamika persepsi masyarakat di media sosial untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus citra polisi RI.